

Analysis Of Internal Control System In Financial Statements Preparation Of Cempaka Putih District Office In Central Jakarta

Dina Evirinindya¹, Khikmatul Islah²

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

*corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Sistem Pengendalian Internal,
Laporan Keuangan Daerah,
Kebijakan Keuangan

Otonomi daerah mengakibatkan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu unsur penting dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sistem pengendalian internal. Terdapat fenomena sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat yang belum dapat tercapai secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian internal, menganalisis faktor yang menjadi hambatan atas sistem pengendalian internal, dan menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan atas sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pendekatan penelitian bersifat pendekatan kualitatif dan deskriptif. Metode analisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian terhadap sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dilihat dari dimensi lingkungan pengendalian sudah berjalan dengan baik serta integritas dan etika juga sudah dijalankan, komitmen tinggi juga pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Hambatan atas sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih yaitu masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)/pegawai, kurangnya pemahaman pegawai, dan masih kurangnya komunikasi antara bawahan dan atasan. Upaya dalam mengatasi hambatan atas sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih dengan menambah SDM, meningkatkan kemampuan SDM yang sudah ada serta peningkatan komunikasi.

PENDAHULUAN

Pada Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi pemerintahan adalah menghindari penyimpangan dari prosedur sehingga laporan keuangan dan fungsi sistem informasi akuntansi yang dihasilkan oleh instansi pemerintahan daerah khususnya Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat lebih terpercaya dan kegiatan instansi Kecamatan Cempaka Putih sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan kinerja suatu organisasi pemerintahan daerah di Kecamatan Cempaka Putih terutama manajemen mampu menghindari risiko penerapan suatu sistem. Secara struktural, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam perancangan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern meliputi pejabat yang berwenang dan pimpinan atau kasubag keuangan. Di sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik/ masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi laporan keuangan disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi keempat karakteristik tersebut untuk mencapai tujuannya, karena keempat karakteristik itu merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Informasi



yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. (Sukmaningrum, 2012). Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Firmansyah dan Sinambela, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal terdapat fakta dilapangan ditemukan fenomena mengenai sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat yang belum dapat tercapai secara optimal, yakni kurangnya pengawasan dalam sistem pengendalian internal yang ada, masih adanya pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kurangnya motivasi dari pimpinan tertinggi, masih adanya pegawai yang tidak mengikuti prosedur kerja, masih sering terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh audit adanya kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal tersebut diantaranya:

- a. Kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, laporan bulanan persediaan tidak dibuat dan nilai persediaan dari hasil stock opname tidak dapat diyakini, sehingga saldo persediaan di akhir tahun tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang mengakibatkan saldo minim;
- c. Kasus kelemahan struktur pengendalian internal terdapat pembukaan dua rekening untuk penerimaan dana atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan pimpinan mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah. Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal tersebut pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

METODE PENELITIAN

1. Penelitian Terdahulu (*State of The Arts*)

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Soleman (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud	Penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2012); Suyono dan Hariyanto (2012); Gusnardi (2011); dan Pratolo (2007) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif akan berdampak pada tata kelola perusahaan yang baik, dan dalam perspektif organisasi sektor publik pengendalian internal yang baik akan akan menaikkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah

			sehingga akan berhubungan positif terhadap pencapaian Good Corporate Governance.
2	Supriatna (2016)	Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)	Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Sanni Kemal Razali Sukarmaji (2011) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Berbasis Good Governance Pada Pemerintah Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis good governance.
3	Tresyani (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Yang Berdampak Pada Kualitas Informasi Akuntansi (Survei Pada Satuan Kerja perangkat Daerah Kota Bandung).	Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12.920 > 2.01$). Koefisien jalur bertanda positif yang berarti semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi maka semakin baik kualitas informasi akuntansi.
4	Nurdin, Tahar, dan Nurbayani (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dapat didukung. Hal tersebut didasarkan pada hasil uji statistik dalam penelitian ini yang menunjukkan nilai t-statistik SPIP signifikan berada di atas acuan nilai 1,96, nilai standar diterimanya hipotesis. Temuan penelitian ini sesuai dengan Bangunan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yang berdasar pada studi Rae dan Subramaniam (2008), Vinten et al. (2005), serta Law (2011) yang menyatakan sistem pengendalian internal mempengaruhi berkurangnya fraud yang terjadi di suatu entitas, dalam hal ini termasuk juga di entitas pemerintah.

5	Taha (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance: Studi Kasus Pada Perusahaan Air Minum (Pam) Tirta Mangkaluku Kota Palopo	Variabel pengendalian internal diukur dengan indikator lingkungan pengendalian (control environment), penilaian/penaksiran risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication) dan pemantauan (monitoring) yang akan berdampak pada penerapan good corporate governance perusahaan. Hasil ini didukung oleh rekapitulasi jawaban dari responden yang menyatakan bahwa perusahaan telah membangun pengendalian internal yang baik melalui pengendalian lingkungan yang kondusif, penilaian risiko yang relevan, aktivitas pengendalian yang handal, informasi dan komunikasi yang memadai dan pengawasan yang efektif sehingga mampu memperkecil segala risiko yang mungkin terjadi serta dapat mendorong peningkatan pelaksanaan good corporate governance pada perusahaan.
6	Thongpaeng (2020)	Effects of Internal Control System on Performance of Local Governments in Sisaket Province, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 520	Variabel pengendalian internal dinilai dari aspek pengendalian lingkungan, aspek penilaian risiko, aspek pengendalian aktivitas, aspek komunikasi dan informasi, dan aspek pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan diantara persamaannya yaitu dalam melakukan penelitian ini sama-sama menggunakan metode survey dengan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi atau studi lapangan langsung terhadap para narasumber sebagai key informan sebagai pelengkap data penelitian dan dibuktikan dengan dokumentasi wawancara dan teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif dari para narasumber yang memberikan berbagai informasi atas data yang peneliti butuhkan, sedangkan perbedaan lainnya yakni : terdapat perbedaan pada tempat, waktu dan lokasi fokus penelitian dan jadwal penelitian yang berbeda serta dengan hasil penelitian yang berbeda-beda pula.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2011:9) mengemukakan bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulai (gabungan)”.

Berdasarkan definisi tersebut maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. karena dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, diantaranya dengan menjelaskan mengenai definisi-definisi sistem pengendalian internal pada Penyusunan laporan keuangan daerah. Selain itu juga akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem pengendalian internal pada Penyusunan laporan keuangan.

Menurut Sugiyono (2012:31) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Penelitian ini memfokuskan pada: sistem pengendalian internal pada Penyusunan laporan keuangan daerah, dalam penelitian ini operasional konsep dapat peneliti memfokuskan pada: Sistem pengendalian internal pada Penyusunan laporan keuangan daerah kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3. Operasionalisasi Konsep

Konsep dan Definisi Konsep	Dimensi	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
Teori Sistem Pengendalian Internal Sekar dan Puspa (2013:59)	1. Lingkungan pengendalian	1. Penegakan integritas dan etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Pegawai di Kantor Kecamatan Cempaka Putih
	2. Penilaian Risiko	1. Penyusunan program dan anggaran dalam memenuhi akuntabilitas 2. Identifikasi		

		<ul style="list-style-type: none"> risiko 3. Analisis risiko 4. Teknologi informasi memadai 5. Ketepatan penyusunan laporan keuangan 		
	3. Aktivitas Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dan kesiapan sarana dan prasarana 2. Akuntabilitas pegawai 3. Pemberian kewenangan yang tepat 4. Pembuatan laporan keuangan 5. Ketepatan waktu pelaporan 	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Pegawai di Kantor Kecamatan Cempaka Putih
	4. Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kualitas komunikasi 2. Kualitas informasi 3. Pengelola data informasi 4. Keterbukaan informasi anggaran 	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Pegawai di Kantor Kecamatan Cempaka Putih
	5. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal 2. Pengawasan eksternal 3. Jadwal pengawasan pelaporan keuangan 4. Kualitas pengawasan 5. Rekonsiliasi anggaran 	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Pegawai di Kantor Kecamatan Cempaka Putih

4. Teknik Sampling

Untuk menentukan informan, penulis menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Mulyadi (2020:151) teknik Purposive Sampling menggunakan judgement dari para ahli dalam memilih sampel atau pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat

a. Dimensi Lingkungan Pengendalian

Dilihat dari dimensi lingkungan pengendalian sesuai dengan jawaban informan diatas maka dapat diketahui sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan kantor Kecamatan Cempaka Putih sudah berjalan dengan baik dan terpenuhinya indikator-indikator dari dimensi lingkungan pengendalian seperti penegakan integritas dan etika telah berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku hal ini juga di dukung dengan tidak adanya pegawai yang melakukan pelanggaran hukum terkait penyusunan laporan keuangan Kantor Kecamatan Cempaka Putih disisi lain prinsip kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan daerah perlu diperhatikan dengan tetap memegang teguh sesuai standar dan tepat waktu secara umum pengelolaan keuangan di kecamatan cempaka putih telah dilakukan secara tertib taat pada aturan, efisiensi, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga pelaksanaan laporan keuangan berjalan dengan baik, komitmen yang tinggi juga meningkatkan kinerja pegawai dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya namun disatu sisi perlu dilakukan penambahan jumlah SDM pegawai untuk membantu pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2011) bahwa Dalam melakukan audit, baik audit laporan keuangan, audit kinerja (performance audit), maupun audit kepatuhan (compliance audit), auditor harus mempertimbangkan dengan seksama efektivitas pengendalian intern yang dimiliki oleh klien. Dalam audit atas laporan keuangan, pemahaman dan pengujian yang memadai atas efektivitas pengendalian intern tersebut sangat penting dalam menentukan sifat, saat, dan luas pengujian substantif yang akan dilakukan oleh auditor seperti yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern juga diperlukan untuk melakukan audit kinerja maupun audit kepatuhan. Dalam audit kinerja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern klien akan membantu luas dan lingkup atas audit yang akan dijalankan, yang disesuaikan dengan tujuan audit. Pemahaman ini juga akan membantu auditor untuk menganalisa sifat dan luas suatu kejadian yang terkait dengan kecurangan dan fraud. Pengendalian intern diharapkan akan membantu manajemen dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang andal, dalam mengassess efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Dimensi Penilaian Risiko

Dimensi ini merupakan kegiatan untuk mengetahui risiko yang berhubungan dengan kemungkinan kesalahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan informan Camat Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat bahwa penyusunan program dan anggaran tentunya melewati beberapa tahapan rencana kerja yang sudah ditetapkan mulai dari awal perencanaan kemudian menjadi program kegiatan yang masuk dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melaksanakan kegiatan tersebut untuk mendukung dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Dan untuk melihat dimensi penilaian risiko dari indikator bagaimana teknologi informasi memadai pada penyusunan laporan keuangan sesuai hasil wawancara dengan

informan bahwa teknologi yang memadai sangat mendukung, menunjang dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan juga penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hastuti, Burhany, Rufaedah, Mai, dan Rochendi (2021) bahwa Sistem pengendalian intern yang baik dan efektif bermanfaat dalam mencegah buruknya kondisi keuangan serta membantu organisasi untuk bekerja secara efektif sambil mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dalam operasinya. Sistem pengendalian intern juga memainkan peran penting dalam aktivitas audit intern karena merupakan hal yang pertama kali diperiksa oleh auditor dalam pekerjaan auditnya.

c. Dimensi Aktivitas Pengendalian

Dimensi aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang terdiri dari beberapa indikator seperti kelengkapan dan kesiapan sarana prasarana, akuntabilitas pegawai, pemberian kewenangan yang tepat, pembuatan laporan keuangan dan ketepatan waktu pelaporan. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Camat Cempaka Putih untuk sarana dan prasarana alat kerja sudah sangat baik dan mendukung dari segi perangkat keras dan lunak sudah mumpuni dan juga di dukung jawaban informan lain sarana dan prasarana sudah sesuai kebutuhan dan cukup memadai. Untuk indikator lainnya sesuai hasil wawancara akuntabilitas pegawai disini sangat mumpuni dan sangat baik, sehingga pembuatan laporan keuangan sudah sangat baik karena didukung system yang baik, sarana dan prasara yang memadai juga ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Satri (2017) bahwa Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dapat membantu meminimumkan atau mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat membuat perusahaan menjadi rugi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor perusahaan untuk tetap mengawasi kegiatan yang sedang berjalan.

d. Dimensi Informasi dan Komunikasi

Dimensi ini untuk mengetahui bagaimana kualitas informasi dan komunikasi pada penyusunan laporan keuangan Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada penelitian ini dimensi informasi dan komunikasi ditentukan oleh beberapa indikator yaitu bagaimana kualitas komunikasi, bagaimana kualitas informasi, pengelola data informasi dan bagaimana keterbukaan informasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa system pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan dilihat dari dimensi ini dimana sesuai jawaban informan Wakil Camat Cempaka Putih komunikasi berjalan dengan baik, penyusunan laporan keuangan daerah memerlukan koordinasi yang baik antara setiap bagian yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan maupun bagian lainnya dan mendukung satu sama lain namun terkadang ada perasaan sungkan berlebihan dan pimpinan tidak menguasai substansi yang diawasi.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Haryoso (2019) bahwa sistem pengendalian internal sebagai struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terorganisir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di

dalam suatu perusahaan untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan dan mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Dimensi Pengawasan

Dimensi ini merupakan suatu aktivitas pengawasan berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dari hasil penelitian sesuai dengan wawancara dengan informan Camat Cempaka Putih maka dapat diketahui pengawasan internal pada penyusunan laporan keuangan daerah kantor Kecamatan Cempaka Putih sudah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang ada baik di pejabat penatausahaan keuangan maupun di saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan dan didukung oleh pernyataan Dodi Kurnia selaku sekretaris camat cempaka putih pengawasan sudah dilakukan pertriwulan juga dilakukan oleh aparat dari luar instansi untuk mengetahui dan menilai kenyataan tentang pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asmawanti dan Aisyah (2017) bahwa peran Satuan Pengawasan Intern sangatlah penting karena bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori berikut, efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga tujuan pengendalian internal yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku adalah cerminan dari organisasi yang memiliki tata kelola yang baik. Pelaksanaan pengendalian internal salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan seberapa baik aktivitas telah dilakukan untuk mencapai tujuan strategis yang ingin dicapai.

2. Hambatan atas Sistem Pengendalian Internal Pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun hambatan yang menjadi permasalahan dalam sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu :
 - a. Kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.
 - b. Kurangnya pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dan kurangnya pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah.
3. Solusi dalam mengatasi hambatan atas Sistem Pengendalian Internal Pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat. Solusi dari penghambat pelaksanaan sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih adalah :
 - a. Kecamatan diberikan kewenangan untuk merekrut tenaga honorer yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat membantu pelaksanaan pelaporan kegiatan di Kecamatan dan juga dari sisi penganggaran dan pelaporan keuangan.
 - b. Pegawai dapat melakukan studi banding pada instansi pemerintah yang memiliki predikat pelaporan keuangan dengan kategori baik dan dapat diberikan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dilihat dari dimensi lingkungan pengendalian sudah berjalan dengan baik integritas dan etika juga sudah dijalankan, komitmen yang tinggi juga pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya namun disatu sisi diperlukan penambahan pegawai untuk memaksimalkan pekerjaan. Lalu dilihat dari dimensi penilaian risiko juga sudah baik semua indikator penilaian risiko sudah terpenuhi. Sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dilihat dari dimensi aktivitas pengendalian sudah berjalan dengan baik didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni juga ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dilihat dari dimensi informasi dan komunikasi sudah baik namun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. Sistem pengendalian internal pada penyusunan laporan keuangan daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat dilihat dari dimensi pengawasan sudah berjalan dengan baik pengawasan sudah dilakukan pertriwulan baik dari dalam maupun luar instansi.
2. Hambatan atas Sistem Pengendalian Internal pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih yaitu masih kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, kurangnya pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, masih kurangnya pengetahuan pegawai mengenai sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah.
3. Solusi dalam mengatasi hambatan atas Sistem Pengendalian Internal pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kantor Kecamatan Cempaka Putih yaitu Kecamatan diberikan kewenangan untuk merekrut tenaga honorer yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan dapat membantu pelaksanaan pelaporan kegiatan di Kecamatan dan juga dari sisi penganggaran dan pelaporan keuangan, Pegawai dapat melakukan studi banding pada instansi pemerintah yang memiliki predikat pelaporan keuangan dengan kategori baik, pegawai dapat diberikan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aan Komariah dan Satori, D.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- [2] Agoes, S. (2016). *Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*. (E. Suharsi, Ed.) (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Amin Widjaja Tunggal .2013.*The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvarindo.
- [4] Azhar, Susanto. 2010. *Sistem Informasi 1, Pendekatan Normal Praktiuka Penyusunan Metode dan Prosedur*, Edisi 5, Bandung : Lingga Jaya
- [5] Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta.
- [6] Budiawan, D. A. dan Purnomo, B. S. (2014), “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, pp.276-288.

- [7] Creswell, J.W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Faridah, E., dan Noviyanti, R. (2017). Pengaruh Kemampuan Personal Pengguna Sistem Informasi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada Pln Rayon Ciamis). *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*. Vol. 4. No. 2.
- [10] Instruksi presiden Nomor 01 Tahun 1989 *tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat*.
- [11] Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 *tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan*.
- [12] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 *tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat*.
- [13] Mulyadi. (2020). *Auditing* (6th ed.). Salemba Empat.
- [14] Mulyani, S. (2014), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No.2, pp. 137-150.
- [15] Mutiana Liza, Yossi Diantimala dan Zuraida.2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- [16] Nurdin, Y. Tahar, F. dan Nurbayani, N. (2019), ”Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan dan Pengungkapan Fraud”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 19 No.2, pp. 116-133.
- [17] Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 tahun 2018 *tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan*.
- [18] Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 tahun 2019 *tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi*.
- [19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 *tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 *tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah atas sistem pengendalian internal*.
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- [23] Putra, W.E. (2017), “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jambi)”, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu (JRAT)* Vol. 10 No.2, pp. 282-293.
- [24] Rusvianto, D., Mulyani, S. & Yulia fitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Bandung). *Jurnal Banquesyar’i* Vol. 4 No. 1. Retrieved September 14th, 2018.
- [25] Sekar, M. dan Puspa Wandanarum.2013. *Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat*. Jakarta: Penerbit Media Bangsa.
- [26] Soemarsono, 2014, *Akuntansi Suatu Pengantar* , Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- [27] Soleman, R. (2013), “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol.17 No.1, pp. 57-74.
- [28] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- [29] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- [30] Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi. UNDIP. Semarang.
- [31] Supriatna, N. (2016), “Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*”, Vol.4 No. 1, pp. 941-948.
- [32] Taha, I.A. (2019), “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance: Studi Kasus Pada Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo”, Vol. 5 No.1, pp. 46-64.
- [33] Thongpaeng. (2020). Development of Accounting System to Enhance Economic Strength for Women of Processing Fermented Fish Group at Ban Dong Tat Thong, Prang Ku District, Sisaket Province. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(9), 6224 - 6235.
- [34] Tresyani, T. (2019). The Effect of Internal Control Systems on the Quality of Accounting Information Systems That Have an Impact on the Quality of Accounting Information (Survey on Regional Work Units in Bandung City). Indonesian Computer University.
- [35] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*;
- [36] Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 *tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*.
- [37] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*;
- [38] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- [39] <https://jakpuskota.bps.go.id/>